



BULUNGAN
BISA!
BERDAULAT - INKLUSIF - SINERGI - ADAPTIF



PEDOMAN TEKNIS INOVASI JARI BULUNGAN

(Jaring Aspirasi Masyarakat Inklusi Bulungan)



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permendagri Nomor 10 Tahun 2025: Mengamanatkan pelibatan Masyarakat inklusif sebagai bahan tak terpisahkan dari tahapan persiapan dan penyusunan rancangan awal RKPD dengan penekanan pada penggunaan instrument strategis seperti Musrenbang Tematik (Inklusi) dan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan sesuai surat **Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/0829/Bangda**. Inovasi JARI Bulungan menghadirkan sebuah terobosan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan kelompok rentan yang menjadi inisiasi pertama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum adanya inovasi, pelibatan masyarakat khususnya kelompok rentan dan marginal (perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, adat, dll) dalam perencanaan pembangunan daerah belum memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Akibatnya, aspirasi mereka seringkali terabaikan dalam forum reguler. Setelah adanya inovasi JARI Bulungan , kelompok rentan (disabilitas perempuan, anak, dan lansia) memperoleh akses partisipasi bermakna ,terpenuhinya kebutuhan spesifik, memiliki Data Aspirasi yang Autentik, legitimasi kebijakan, sinkronisasi kebijakan, dan terwujudnya keadilan sosial.

2. Tujuan

- Mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dan marginal
- Meningkatkan kualitas partisipasi Masyarakat
- Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
- Mensinergikan usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah
- Mengurangi kesenjangan sosial dan pelayanan public
- Mendorong implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia
- Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan

3. Sasaran

JARI Bulungan memberikan sejumlah manfaat nyata baik bagi Pemerintah daerah maupun kelompok rentan (disabilitas perempuan, anak, dan lansia sehingga membawa dampak positif bagi efektivitas pemerintah dan kesejahteraan masyarakat:

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

1. Tersusunnya usulan program yang lebih tepat sasaran

Kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal, dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Meningkatnya keterwakilan kelompok rentan dalam pembangunan

Perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, pemuda, masyarakat miskin, dan kelompok lainnya memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan pembangunan.

3. Pembangunan daerah menjadi lebih inklusif dan berkeadilan

Program pembangunan tidak hanya fokus pada wilayah atau kelompok tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Karena perencanaan lebih memperhatikan aksesibilitas, kebutuhan khusus, dan pemerataan layanan.

5. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

Melalui program yang lebih responsif terhadap kemiskinan, disabilitas, perlindungan perempuan dan anak, serta isu sosial lainnya.

6. Meningkatnya transparansi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah

Karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan.

7. Terbangunnya kolaborasi antar pemangku kepentingan

Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dapat bekerja bersama dalam penyelesaian masalah pembangunan.

8. Tersedianya data dan isu prioritas kelompok tematik

Yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penganggaran daerah.

9. Terwujudnya prinsip “No One Left Behind” dalam pembangunan daerah

Tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terabaikan dalam proses pem

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. **Tahap Persiapan**, tahapan ini adalah awal dari mempersiapkan tim dan pembahasan lanjut tim untuk persiapan musrenbang tematik. Seperti penentuan Tema, Pengum[ulan Isu Tematik, Jadwal, dan urusan lainnya
2. **Tahapan Pra-Musrenbang**, setelah membuat sistematika / alur, di tahapan ini mulai melaksanakan diskusi dengan kelompok masyarakat rentan, mengidentifikasi isu terkini dengan kebutuhan prioritas, sehingga membentuk daftar usulan awal.
3. **Tahapan Pelaksanaan Musrenbang**, di tahapan ini dilaksanakan Pemaparan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Penyampaian kondisi dan isu strategis kelompok tematik. mensinkronkan dan membahas usulan program/kegiatan. Dan Penetapan skala prioritas usulan
4. **Tahapan Integrasi Ke Dokumen Perencanaan Daerah**, dalam tahapan ini, Aspirasi yang telah di sampaikan oleh masyarakat akan di integrasikan dengan RKPD pengampu untuk di masukkan dalam dokumen perencanaan, yaitu dokumen RENJA. Untuk menyesuaikan wewenang, ketersediaan anggaran, dan prioritas pembangunan
5. **Tahapan Monitoring dan Evaluasi**, di tahap terakhir ini , dilaksanakan selama 1 tahun setelah musrenbang dilaksanakan, tim akan memantau realisasi program ,capaian kegiatan dan Menilai efektivitas pelaksanaan

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas inovasi, berikut adalah indikator utama yang harus dicapai:

Kategori Inovasi	Indikator Keberhasilan Terukur
Perwujudan keadilan sosial	
Efisiensi Anggaran (Targeting Accuracy)	Dengan keterlibatan kelompok tematik, anggaran yang terbatas dapat dialokasikan pada program yang benar-benar berdampak.
Peningkatan Kepercayaan Publik (Public Trust)	Masyarakat merasa didengarkan dan dilibatkan. Hal ini menurunkan risiko konflik sosial dan meningkatkan partisipasi warga dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Inovasi Kebijakan	Diskusi tematik sering kali melahirkan ide-ide kreatif yang tidak terpikirkan dalam rapat formal kantor pemerintah, karena perspektif yang dibawa oleh peserta sangat beragam dan berbasis pengalaman hidup (<i>lived experience</i>).

BAB V

PENUTUP

JARI Bulungan memberikan sejumlah manfaat nyata baik bagi Pemerintah daerah maupun kelompok rentan (disabilitas perempuan, anak, dan lansia sehingga membawa dampak positif bagi efektivitas pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pelibatan masyarakat diharapkan mendukung penguatan ruang afirmatif bagi kelompok rentan (disabilitas perempuan, anak, dan lansia) sehingga Pemerintah Kabupaten Bulungan mampu meningkatkan upaya partisipatif masyarakat menuju perencanaan inklusif.